

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abuyamin, Oyok, 2010, *Perpajakan Pusat & Daerah*, Humaniora, Bandung.

_____, 2015, *Perpajakan*, Mega Rancage Press, Bandung.

Amiruddin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Badrulzaman, Mariam Darus, 1996, KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan, Alumni, Bandung.

Budiarto, Agus, 2012, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Bohari, 2008, *Pengantar Hukum Pajak*, PT Raja Grafindo, Jakarta.

Fuady, Munir 2013, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta.

_____, 2014, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Djoni S.Gazali dan Rachmadi Usman, 2010, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Ginting, Jamin, 2007, *Hukum Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Harahap, M.Yahya, 2005, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Khairandy, Ridwan, 2009, *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi*, Kreasi Total Media, Yogyakarta.

Mahfud MD, Moh, dkk, 2012, *Prosiding Kongres Pancasila IV: Strategi Pelembagaan Nilai-Nilai Pancasila dalam Menegakan Konstitusionalitas Indonesia*, Pusat Studi Pancasila UGM, Yogyakarta.

Mertokusumo, Sudikno, 2009, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

Muljadi, Kartini, 2005, *Kreditor Preferen dan Kreditor Separatis dalam Kepailitan*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta.

Nur, Aco, 2015, *Hukum Kepailitan: Perbuatan Melawan Hukum oleh Debitor*, Yuris Ultima, Jakarta.

Prasetyo, Rudy, 1996, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Prodjodikoro, Wirjono, 2000, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung.

Purwosutjipto, 1982, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta.

Rahardjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Resmi, Siti, 2009, *Perpajakan: Teori dan Kasus*, Salemba Empat, Jakarta.

S.Gautama, 1987, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Binacipta, Bandung.

Saidi, Muhammad Djafar, 2007, *Pembaharuan Hukum Pajak*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 313.

Salim H.S, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Shubhan, Hadi, 2014, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana Prenadamedia Group.

Sinaga, Harlen, 2012, *Batas-Batas Tanggung Jawab Perdata Direksi: Atas Pailitnya Perseroan Terbatas, Dalam Teori dan Praktik*, Adinatha Mulia, Jakarta.

Sinamo, Nomoensen, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, 2007, *Penelitian Hukum Normatif – Suatu Tinjauan Singkat*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1980, *Hukum Perutangan Bagian A*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

Subki, Muhammad Sukri Subki dan Djumadi, 2007, *Menyelesaikan Sengketa melalui Pengadilan Pajak*, PT.Elex Media Kpmutindo, Jakarta.

Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, Alfabeta, Bandung.

Surakhmad, Winarno, 2003, *Dasar dan Teknik Research: Pengantar Metodologi Ilmiah*, Tarsito, Bandung.

Usman, Rachmadi, 2004, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Alumni, Bandung.

Widjaja, Gunawan, 2008, *Resiko Hukum sebagai Direksi, Komisaris, dan Pemilik PT*, Forum Sahabat, Jakarta.

Zuraida, Ida dan Advianto, L.Y. Hari Sih, 2011, *Penagihan Pajak: Pajak Pusat dan Pajak Daerah*, Ghalia Indonesia, Bogor.

B. Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189).

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4443).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4661).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).

Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 480).

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 71/PMK.04/2012 tentang Tata Cara Penghapusan dan Penetapan Besarnya Penghapusan Piutang Bea Masuk dan/ atau Cukai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 499).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 258/PMK.04/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.04/2011 tentang Audit Kepabeanaan dan Audit Cukai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 12).

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 169/PMK.04/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.04/2013 tentang Tata Cara Penagihan Bea Masuk dan/ atau Cukai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1656).

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2017 tentang Persyaratan untuk Menjadi Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1736).

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212/PMK.01/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1981).

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pedoman Imbalan Jasa bagi Kurator dan Pengurus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 513).

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 562/KMK.04/2000 tentang Syarat-Syarat, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Jurusita Pajak.

C. Putusan/ Penetapan Hakim

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013.

Putusan Pengadilan Niaga Nomor 44/Pailit/2009/PN/Niaga.Jkt.Pst.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 239/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 188/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Tim.

Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 43/Pdt/2018/PT.DKI.

Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 385/Pdt.G/2016/PN.Smg.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 368K/Pdt.Sus/2012.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2537K/Pdt/2013.

Penetapan Hakim Pengawas Nomor: 01/HP/IX/2009-44/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Penetapan Hakim Pengawas Nomor 03/HP/XI/2009-44/PAILIT/2009/PN.NIAGA.Jkt.Pst.

D. Hasil Penelitian/ Tugas Akhir

Haristyani, Dwian Widyanti, 2006, *Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak di Bank dalam Proses Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*, Tesis, Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Permanasari, Dwindia Asterita, 2013, *Analisa Hukum tentang Pemblokiran Rekening Bank Wajib Pajak sebagai Salah Satu Pelaksanaan Surat Paksa (Studi Kasus PT HI)*, Tesis, Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Steven M, David, 2017, *Kajian Mengenai Aspek Kewenangan Direktorat Jenderal Pajak dalam Upaya Pemenuhan Pelaksanaan Hak dari Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak yang Dipailitkan*, Tesis, Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Jakarta.

E. Makalah/ Artikel

Huda, Miftahul, “Tindakan dan Keputusan Pejabat DJBC yang Berakibat Hukum Gugatan/ Sanggahan ke Pengadilan dalam Hukum Keperdataan”, *Makalah*, Simposium yang diselenggarakan oleh Subdit Upaya Hukum, Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan, DJBC, Kantor Pusat DJBC, Jakarta, 30 November 2018.

Simanjuntak, Ricardo, “UU Kepailitan Ancaman Bagi Kreditor atau Debitor?”, *Makalah*, Workshop Kepailitan yang diselenggarakan Kontan Academy, Hotel Santika, Slipi Jaya, Jakarta, 01 September 2016.



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

“Tinjauan Kritis atas Penyitaan yang Dilakukan Jurusita Pajak Terhadap Barang Milik (Mantan) Direksi, Komisaris, dan/ atau Pemegang Saham Perseroan Terbatas yang telah mengalami Pailit dan/ atau Pembubaran”

MARTIN S TJAHJADI, Prof. Dr. Sulistiowati, S.H., M.Hum.

Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

Manan, Bagir, “Organisasi Peradilan di Indonesia”, artikel dalam *Penataran Hukum Administrasi Tahun 1997/ 1998 Pelaksana Program Kerjasama Hukum Indonesia-Belanda*, Fakultas Hukum Airlangga, Surabaya.

Moeliono, Tristam, “Ketika Sistem Kodifikasi Ditinggalkan: Telaah atas *Discourse Shopping/ Forum Shopping* dalam Praktik Hukum di Indonesia”, artikel dalam *Percikan Gagasan tentang Hukum IV: Mewujudkan Keadilan Sosial di Tengah Arus Perubahan Hukum, Sosial Budaya, Politik dan Ekonomi di Indonesia*, FH UNPAR, Bandung.

F. Internet

Benda-Beckmann, Keeber von, “Forum Shopping and Shopping Forums: Dispute Processing in a Minangkabau Village in West Sumatra”, <http://commission-on-legalpluralism.com/volumes/19/kvonbendabeckmann-art.pdf>, diakses tanggal 28 Desember 2018.

Hanjarwadi, Waluyo, “Menunggak Pajak, Aset Penanggung Disita”, <https://majalahpajak.net/menunggak-pajak-aset-penanggung-disita/>, diakses tanggal 23 Mei 2018.

Hidayat, Anwar, “Metodologi Penelitian: Penjelasan Teknik Purposive Sampling Lengkap Detail”, <https://www.statistikian.com/2017/06/penjelasan-teknik-purposive-sampling.html>, diakses tanggal 05 Juni 2018.

Prastowo, Yustinus, “Apa Perbedaan Praktik Penghindaran Pajak dengan Penggelapan Pajak”, <https://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/04/14/083000826/Apa.Perbedaan.Praktik.Penghindaran.Pajak.dan.Penggelapan.Pajak>, diakses tanggal 2 Oktober 2018.

H.Sarwohadi, “Penyelesaian Perkara Gugatan Pihak Ketiga/ Derden Verzet”, http://edoc.pta-mataram.go.id/sys-content/uploads/file/eDoc/Artikel/Artikel_Sarwohadi_2017-04-11_Penyelesaian_Derden_Verzet.pdf, diakses tanggal 3 Oktober 2018.

Shidarta, “Teori Hukum Integratif dalam Konstelasi”, <http://shidarta-articles.blogspot.com/2012/05/teori-hukum-integratif-dalam-konstelasi.html>, diakses tanggal 29 April 2013.